

THE BUDGET LAZINESS: SUSTAINABLE VILLAGE GOVERNANCE

Soraya Lestari

Fakultas Ekonomi, Universitas Ubudiyah Indonesia
soraya.lestari@uui.ac.id

Abstract

Sustainable development helps realize economic growth. In the process, there must be consistency in the application of economic growth by carrying out procedures by predetermined principles. The purpose of this study is to examine the consistency of the budget used as a tool for village economic growth. However, there are still many budget falsehoods. Where the budget is not perfect as a driving force for the community's economy to carry out productivity and catch up with the village's backwardness. This can be seen from the three elements that have been grouped into input, process, and output. In practice, the village budget must have an impact factor, where this factor determines the target village budget. As well as a measuring tool for assessing the performance of the village budget. Another thing that is still minimal in rural areas is building a good network of cooperation between villages, provinces, and internationally. This will indirectly support the village towards sustainable development because of the attachment of needs and an increase in the village economy that runs productively.

Keywords: Budget Laziness, Sustainable Village, Governance, Impact Factors

Abstrak

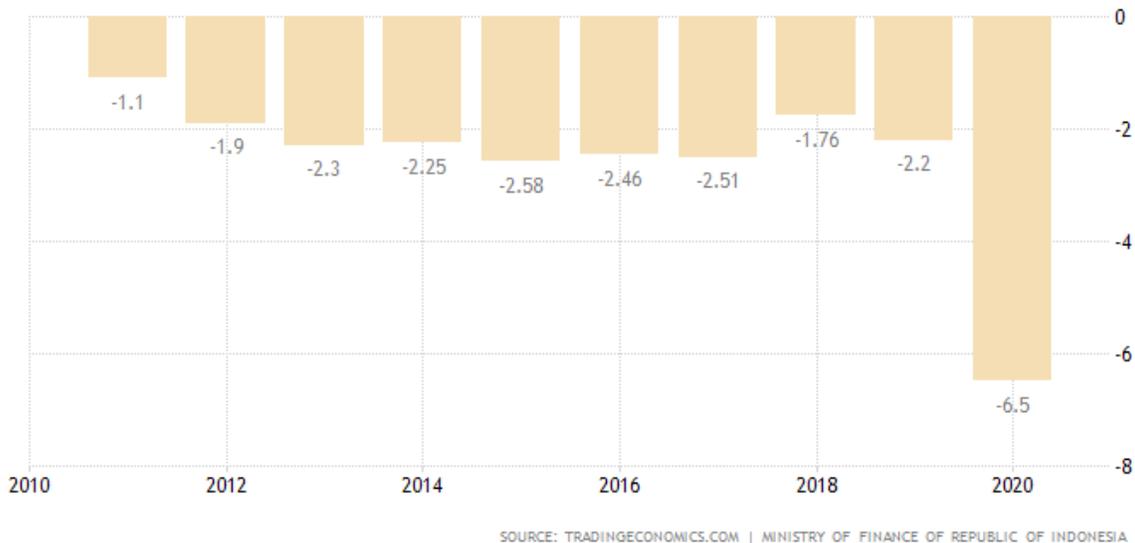
Pembangunan berkelanjutan membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Dalam prosesnya, harus ada konsistensi penerapan pertumbuhan ekonomi dengan menjalankan prosedur yang sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengupas konsistensi anggaran yang digunakan sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi desa. Namun sayangnya, masih banyak dijumpai kemalsan anggaran. Dimana anggaran belum sepenuhnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat untuk melakukan produktifitas dan mengejar ketertinggalan desa. Hal ini dapat dilihat dari tiga unsur yang sudah dikelompokkan menjadi input, proses dan output. Dalam prakteknya, anggaran desa harus memiliki faktor dampak, dimana faktor ini menentukan pencapaian target anggaran desa. Serta sebagai alat ukur penilaian kinerja anggaran desa. Hal lain yang masih minim di pedesaan adalah membangun jaring kerjasama yang baik baik antar desa, provinsi maupun secara internasional. Hal ini secara tidak langsung akan mendukung desa menuju pembangunan yang berkelanjutan karena adanya keterikatan kebutuhan dan peningkatan ekonomi desa yang berjalan produktif.

Kata Kunci: Kemalsan Anggaran, Desa Berkelanjutan, Pemerintahan, Faktor Dampak

PENDAHULUAN

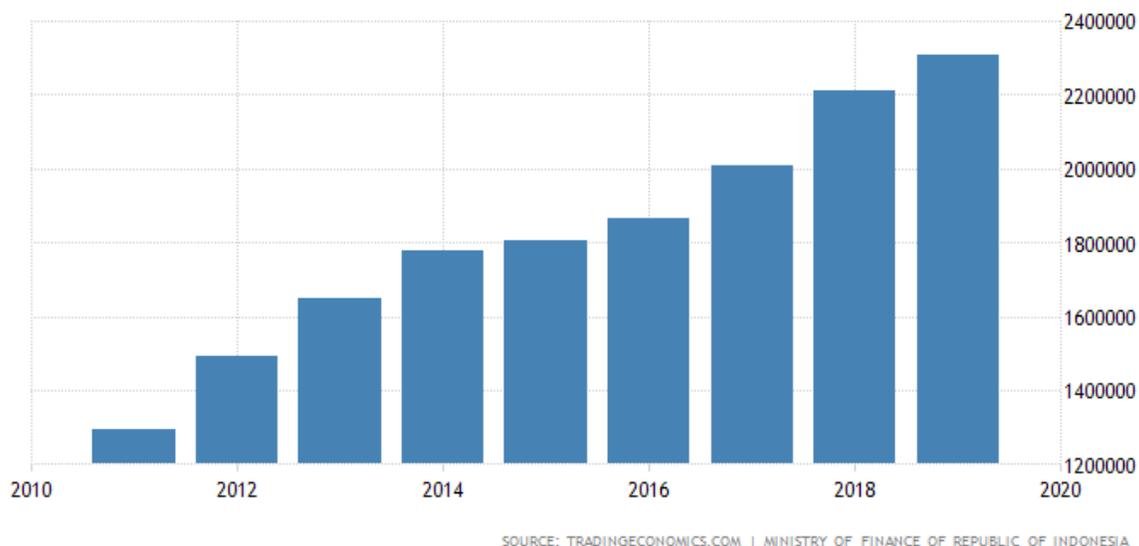
Anggaran merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Begitu juga dalam pemerintahan. Anggaran memegang peran penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana saat ini, pasca Covid-19 pemerintah banyak mensupport anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19 di berbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan, perbankan dan UMKM. Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa covid-19 berdampak pada banyak aspek sosial, ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemulihan ekonomi nasional dalam kesatuan kebijakan yang strategis dan terintegrasi. Pasal 18 menyatakan bahwa biaya dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dampak covid-19 juga dapat dilihat pada anggaran, Anggaran pemerintah Indonesia mengalami penurunan di tahun 2020, jika di lihat dari persentase GDP, penurunan anggaran di tahun 2020 sebesar -6,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -2,20 persen.



Gambar 1. Persentase GDP tahun 2020

Pengeluaran fiskal pemerintah yang menunjukkan jumlah pengeluaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Pengeluaran yang masuk kedalamnya antara lain pengeluaran untuk barang dan jasa, investasi dan pembayaran transfer seperti jaminan sosial serta tunjangan pengangguran. Pengeruaran fiskal merupakan bagian dari neraca anggaran pemerintah. Pada Gambar 2 dapat dilihat adanya peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Pengeluaran Fiskal

Dalam banyak hal, penganggaran merupakan aspek penting untuk mencapai kemakmuran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat dalam satu periode, biasanya satu tahun. Anggaran dibuat untuk menentukan rencana pemerintahan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sehingga dalam penganggaran berisi pendapatan dan beban pemerintah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban anggaran bukan merupakan hal yang mudah, semakin besar peningkatan jumlah anggaran setiap tahunnya akan semakin besar tingkat pengendalian internal yang dilakukan, karena beresiko terjadinya fraud sehingga pertanggungjawabannya pun akan semakin sulit.

Bagi pengguna anggaran, tentunya akan mudah untuk melakukan pertanggungjawaban apabila rencana anggaran dilakukan sesuai dengan target yang dianggarkan. Namun sayangnya kemalasan anggaran sering menjadikan anggaran sebagai sejumlah uang yang terpaksa harus dihabiskan setiap tahunnya untuk mencapai target realisasi. Sehingga sering terjadi disfungsi anggaran. Hal ini salah satunya dengan berlomba-lombanya setiap SKPD pada akhir tahun untuk membuat kegiatan demi merealisasikan anggaran. Sayangnya hal ini malah merugikan anggaran dikarenakan disfungsi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kemalasan anggaran dapat dilihat dari budaya penganggaran yang masih sama setiap tahunnya. Sebagaimana anggaran desa, secara umum masih belum transparan dan efisien. Kemalasan anggaran disini diartikan bahwa anggaran belum mampu menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menggunakannya. Sehingga masih banyak masyarakat yang merasa belum menikmati anggaran tersebut karena tidak berdampak langsung. Hal ini sangat disayangkan, karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sistem penganggaran yang baik dapat membantu pemerintah desa untuk mencapai desa yang mandiri berkelanjutan. Artinya, dengan penganggaran yang baik desa mampu untuk mengembangkan sumber pendapatan desa. Dengan adanya pengembangan sumber pendapatan desa, akan meningkatkan taraf hidup pedesaan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Kepala desa harus mampu melihat potensi yang ada di desanya untuk kemudian dianggarkan menjadi lebih profitable. Selanjutnya, desa juga harus mengejar pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memasarkan produk unggulan desa menjadi kekayaan dalam negeri.

Pemanfaatan anggaran untuk pengembangan produk desa menjadi hal yang seharusnya sangat disyukuri. Hal ini dikarenakan setiap desa berpotensi untuk berkembang jauh lebih baik sesuai dengan tujuan desa tersebut. Hal ini tentunya harus didukung oleh keinginan dan kapasitas kepala desa serta aparatur penganggaran yang fisioner. Namun sayangnya, masih banyak terdapat kepala desa serta aparatur pemerintahan desa yang berpendidikan rendah yang pada akhirnya akan berdampak kepada pola penganggaran yang berulang setiap tahunnya. Kemalasan anggaran dapat dilihat dari beberapa hal seperti transparansi, waktu, ekonomis, sumber daya manusia, teknologi dan impact factor.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintahan Desa yang Berkelanjutan

Sistem pemerintahan desa secara berkelanjutan menunjukkan eksistensi dan konsistensi desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Sudah sepatutnya desa yang merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan menjadi basis kegiatan dan pembangunan (Laka dan Suprasto, 2020). Namun sayangnya, pembangunan desa sering dihadapkan dengan masalah-masalah dilapangan. Tidak adanya benang merah arah perencanaan pembangunan pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan pusat menyebabkan pembangunan seringkali berjalan masing-masing. Program pembangunan yang dilakukan secara *Top-down* tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat di bawah, sementara perencanaan *Bottom-Up* seringkali tidak terakomodir walaupun telah diusulkan sampai ke tingkat pusat, sehingga manfaat hasil pembangunan tidak dirasakan secara maksimal (Rohiani, 2021).

Transparansi dan komitmen akuntabilitas anggota dewan terpilih sangat penting, dimana yang menyangkut transparansi antara lain ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, pengeposan informasi pada situs resmi dewan, posting laporan online di akun media sosial, posting peraturan kantor yang mengatur distribusi layanan publik, dan publikasi target kebijakan dalam meminta partisipasi warga dalam hal pembebasan kebijakan, serta hal-hal yang menyangkut akuntabilitas adalah pencantuman nama-nama orang yang bertanggung jawab atas pelayanan tertentu, penetapan check and balances untuk memelihara sistem pemerintahan lokal yang efektif, publikasi indikator kinerja yang relevan, dukungan untuk pemilihan recall anggota dewan, dan ketaatan. aturan dan regulasi internal yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem politik lokal (Gabriel, 2017). Transparansi terhadap perkembangan desa merupakan komitmen yang harus dilaksanakan, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pertanggungjawaban.

Pemerintah desa yang berkembang secara berkelanjutan nantinya akan membawa pemerataan antara kota dan desa. Desa tetap dapat mengikuti modernisasi dan peningkatan teknologi dengan kemajuan kapasitas dan SDM yang dipupuk secara terus menerus. Anggaran pemerintah desa tidak hanya digunakan untuk peningkatan aset desa namun juga kapasitas SDM dan budaya lokal yang baik untuk dikembangkan. Pemerintah desa dapat melakukan improvement terhadap sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Penganggaran

Banyak negara asing yang menggunakan teknologi manajemen terpadu untuk merencanakan, menerapkan, dan menerapkan sistem kontrak memenuhi kebutuhan pemerintah. Ciri khusus pada sistem kontrak nasional adalah penerapan metode perencanaan secara luas dengan memenuhi kebutuhan pemerintah, memantau harga, kontrak sampel, mekanisme kontrol kontrak, sumber informasi khusus di evaluasi dalam pelaksanaan kontrak negara dan manajemen kontrak. Secara umum, di negara maju, pengadaan publik didasarkan pada transparansi, kesetaraan peserta pengadaan publik, efektivitas transaksi, dan tanggung jawab para pihak (Abduhalilovich, 2020). Teknologi juga dapat diterapkan dalam sistem penganggaran, agar pihak-pihak yang terlibat dalam sistem penganggaran dapat memperoleh informasi dengan real time.

Penganggaran merupakan aspek penting dalam organisasi maupun pemerintahan. denganggaran yang baik akan mengantarkan anggaran kepada peningkatan ekonomi secara merata. Dalam penganggaran juga harus memperhatikan kesesuaian program, karena hal ini akan berdampak pada realisasi anggaran. Yang paling penting adalah anggaran harus di susun sejalan dengan visi misi perusahaan. Sebagai para ahli percaya bahwa kelonggaran anggaran dapat menyebabkan pemborosan sumberdaya dan perusahaan yang tidak efisien (Tong dan Prompanyo, 2021). Begitu pula dengan realisasi, anggaran yang tidak terealisasi merupakan anggaran pasif dan tidak dapat menambah nilai ekonomis. Hal ini sangat disayangkan karena anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk program lain yang lebih menguntungkan.

Dalam penganggaran juga sangat beresiko terhadap penyelewengan, olehkarena itu, harus ada sistem pengendalian yang baik. sistem pengendalian juga dapat dibuat secara bertingkat sesuai dengan tingkat keparahan dan besaran anggaran. Sistem pengendalian internal partisipasi yang baik dari elemen organisasi dalam mempersiapkan anggaran berdampak pada baiknya kualitas laporan keuangan (Bandiyono, 2020).

Budged Slack

Budget slack merupakan cara yang dilakukan manager untuk mendapatkan kinerja yang baik dengan target yang rendah. Manajer membuat capaian anggaran dibawah kemampuan dan kapasitasnya untuk merealisasikan anggaran. Dalam budged slack, mengutamakan kepentingan pribadi dalam penyusunan anggaran. Hal ini dikarenakan kinerja manajemen secara output diukur dengan capaian realisasi anggaran. Bagaimana menahan kesenjangan anggaran selalu menjadi fokus yang dipermasalahkan dalam praktek dan penelitian anggaran, namun pengawasan terhadap penyalahgunaan belum dieksplorasi dalam kontek penganggaran, sehingga

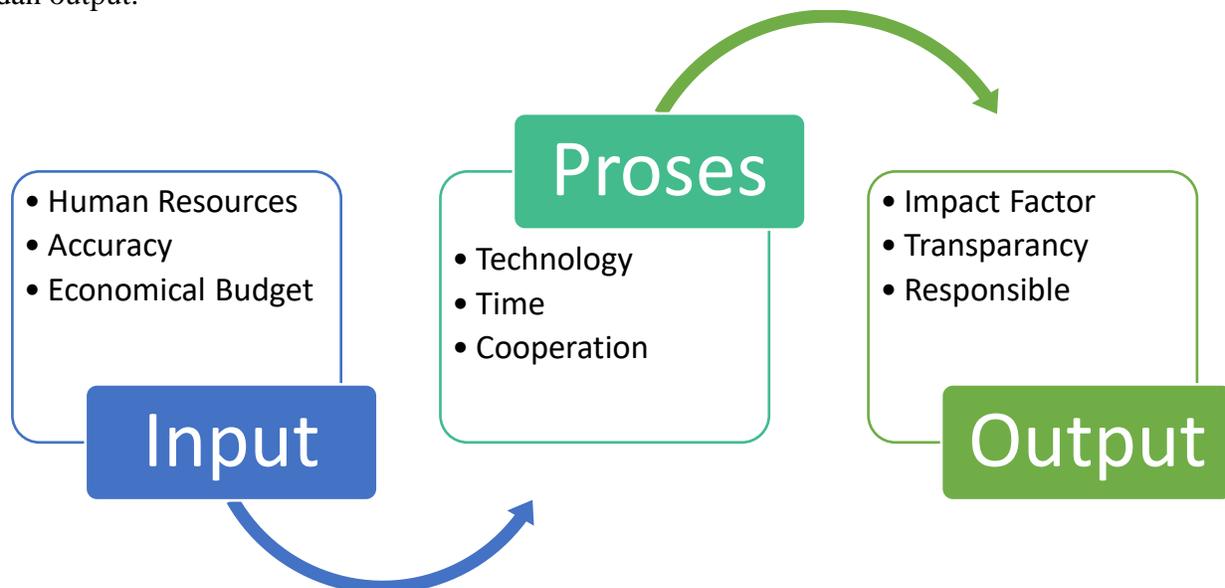
harus adanya pengawasan yang kejam dalam konteks anggaran serta melengkapi perilaku negatif lainnya (Tong dan Prompanyo, 2021).

Kesenjangan anggaran juga dipengaruhi oleh rekan yang tidak jujur, membuat senjangan anggaran lebih besar daripada pengaruh rekan yang jujur di bawah kondisi asimetri informasi (Rahmawati, 2019). Hal ini dikarenakan atasan mempunyai pengetahuan dan informasi yang lebih banyak dari bawahan, sehingga target terhadap bawahan pun masih lebih rendah daripada kemampuan capaiannya. Perilaku budgetary slack menyebabkan hal negatif terhadap peningkatan kinerja, dimana manajer tidak melakukan pekerjaan dengannya dengan maksimal sehingga menimbulkan kemalasan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan desa secara berkelanjutan merupakan tujuan dari kemandirian desa. Desa yang mandiri diharapkan mampu untuk menjadi penggerak perekonomian dari bawah. Artinya, masyarakat desa sudah mampu mengelola sumberdaya desa serta memiliki skill yang memadai untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Hal ini bukanlah mustahil, mengingat UMKM merupakan sumbangsi terbesar terhadap peningkatan perekonmian negara. Namun sayangnya masyarakat saat ini masih terkendala dengan pola penganggaran yang statis.

Pola anggaran yang statis menyebabkan kemalasan dalam anggaran, dimana seharusnya anggaran menjadi alat bagi desa untuk lebih produktif tetapi digunakan hanya sebatas pemeliharaan dan pembelian aset. Secara ekonomi, anggaran yang produktif merupakan anggaran yang memiliki output profit, sehingga sebenarnya konsep anggaran desa dapat disamakan dengan bisnis tetapi masih dalam batasan undang-undang desa. Adapun pola anggaran yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas desa dapat dilihat pada Gambar 3. Dimana proses penganggaran dibagi menjadi tiga tahapan penting yaitu input, proses dan output.



Gambar 3. The Budget Process Required

Input dalam penganggaran melibatkan item yang sangat penting seperti sumber daya manusia, akurasi dalam penganggaran dan anggaran yang ekonomis, dimana dalam penganggaran harus tepat dan sesuai dengan output. Dari segi proses penganggaran harus menggunakan teknologi untuk dapat mengeskplor desa tersebut dan mempermudah pekerjaan, tingkat keakuratan waktu juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses berjalannya pekerjaan serta desa harus meningkatkan kerjasama demi penguatan organisasi yang dikelola desa. Sedangkan output melihat dampak dari anggaran itu sendiri. Program yang dianggarkan harus memiliki impact factor yang tinggi, membangun transparansi untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan serta kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban yang baik.

Sumber Daya Manusia

Banyaknya dana yang dialokasikan ke kecamatan serta jumlah belanja modal yang besar memberikan peluang terjadinya fraud dan kesenjangan anggaran dalam sistem pemerintahan. hal ini diperburuk dengan kondisi pemerintahan desa, dimana masih terdapat banyak pengelola anggaran dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan yang rendah. Latar belakang pendidikan dan kapasitas sumberdaya manusia perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan, seminar dan pelatihan. Pengembangan sumberdaya manusia adalah proses pembelajaran jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Manajer mempelajari pengetahuan baik konseptual maupun teoritis yang selanjutnya diimplementasikan dalam SDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan memelihara serta meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia untuk dapat mencapai efektivitas di dalam organisasi (Latupeirissa dan Suryawan, 2021).

Fakta empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana negara Jepang dan Switserland, walaupun memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas namun mampu masuk dalam urutan IHD (Index of Human Development) (Soeboko dan Riyardi, 2020). Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi sumber daya manusia, dari SDM yang bersifat tradisional kepada SDM yang bersifat inovatif. Transformasi sumberdaya manusia adalah perubahan praktek dan fungsi dari sumber daya manusia ke arah yang lebih strategis, terintegrasi, selaras, inovatif serta berfokus pada bisnis yang pada akhirnya dapat membantu organisasi memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, investor dan pemegang saham (Suryaningtyas, 2013).

Aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran yang merencanakan anggaran dengan matang pada setiap program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan menjadikan kegiatan berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna aparatur pemerintah pengelola anggaran didukung oleh kompetensi yang tinggi, mempengaruhi perilaku kerja aparatur pemerintah yang kemudian akan mempengaruhi kinerjanya serta kinerja organisasi secara umum (Rahmawati dkk, 2021).

Akurasi Penganggaran

Akurasi dalam penganggaran sangatlah penting. Bagaimana tidak, dengan menentukan anggaran secara akurat maka akan meningkatkan kredibilitas aparatur dalam penganggaran. Kalembang dkk (2017) menyatakan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam system pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dalam hal tertentu, akurasi secara relatif dapat menghemat biaya. Namun, manager kas perlu bekerja keras untuk menentukan berapa banyak yang dapat dihemat. Dengan akurasi dapat menghemat waktu dan uang. Dengan cara memprediksi keakuratan dapat mengevaluasi kembali biaya yang dianggarkan dengan kebijakan yang sesuai (Molina dkk, 2017). Banyak kemajuan yang didapat dengan menggunakan metode forecasts, tapi diperlukan pemahaman yang baik bagaimana akurasi dalam forecasting yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan dalam konteks produksi dan hasil akhir yang digunakan. Keakuratan perkiraan akan meningkat jika legislatif dan eksekutif bersikap independen. Literatur dalam menentukan forecasting menunjukkan bahwa forecasting berbasis grup dapat meningkatkan keakuratan perkiraan dan legitimasi (Deschamps, 2004).

Semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya komitmen bersama oleh semua *stakeholder*, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan pada satker, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas. Namun, apabila tingkat akurasi penarikan dana relatif rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DIPA (Seftianova dan Adam, 2013).

Anggaran yang Ekonomis

Penerapan anggaran harus sesuai dengan performance budget dimana anggaran memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik secara ekonomis, efisien dan efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Ayuningsasi, 2009). Hal ini dikarenakan banyak masalah yang terjadi di lapangan dalam menentukan anggaran tidak memperhatikan konsep value for money. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risna dan Batubara (2020) menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan menggunakan konsep *value for money*.

Penelitian yang dilakukan oleh Karbhari dan Mohammad (2007) menyatakan bahwa Modified Budgeting System (MBS) merupakan salah satu peraturan manajemen keuangan publik, New Public Financial Management (NPFM) yang memberikan efisiensi pada sektor privat di organisasi pemerintahan Malaysia yang berdampak pada sistem pengukuran kinerja. MBS mengarahkan organisasi pemerintahan untuk dapat menilai kembali program dan kegiatan mereka agar konsisten dengan tujuan organisasi yang pada akhirnya program tersebut harus mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara luaran dan hasil dan sumberdaya yang dihasilkan, atau evaluasi terhadap kinerja yang sulit dibuat. Setiap aktivitas pelanggan dan kelompok sasaran perlu disesuaikan dengan benar, kebutuhan dan keinginan

harus diidentifikasi dan diperbarui. Organisasi pemerintah didorong untuk dapat ikut mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka serta departemen keuangan harus memastikan bahwa sumberdaya publik dialokasikan sesuai dengan bidang prioritas.

Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi dapat membantu kinerja anggaran, seperti koordinasi antara perangkat daerah dapat dilakukan dengan sistem teknologi terintegrasi sehingga mempermudah perangkat daerah atau desa untuk memantau dan mengkoordinasi kinerja anggaran dengan real time. Selanjutnya, dengan menggunakan teknologi, ketepatan data baik berupa kesesuaian anggaran dengan proposal dapat langsung dicocokkan keakuratannya. Hal ini dikarenakan salah satu yang menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran dikarenakan data yang tidak lengkap dan tidak akurat, sehingga membutuhkan waktu lama untuk tahap koreksi.

Dengan menggunakan teknologi juga mempermudah inspektorat dan auditor untuk melakukan sistem pengendalian internal serta pihak yang berwenang untuk melakukan pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi dapat membantu memperkuat tingkat penggunaan Teknologi Informasi terhadap karyawan. Hal ini tentunya menunjang produktivitas perusahaan. Dimana, sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan melaksanakan proses operasional dan informasi dengan lebih efektif dan efisien sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Teknologi Informasi berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai semakin meningkat serta menyelesaikan permasalahan pengolahan data dan penyajian (Astika & Dwirandra, 2020).

Abduhalilovich(2020) menyatakan bahwa Salah satu tujuan utama penggunaan e-commerce adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui penggunaan anggaran negara secara efektif. Transparansi e-commerce akan memastikan pengembangan sistem pengadaan publik dan penghematan anggaran yang lebih efisien. Apabila pengadaan barang (pekerjaan, jasa) oleh pemerintah dilakukan melalui e-portal yang lengkap maka efisiensi dan penggunaan dana anggaran secara rasional akan meningkat.

Ketepatan Waktu

Waktu seringkali menjadi sumber masalah dari minimnya realisasi anggaran. Namun waktu tidak bisa disalahkan untuk anggaran yang tidak mampu direalisasikan. Lambatnya kegiatan pelaksanaan program terjadi dikarenakan pengguna anggaran tidak berfokus terhadap waktu pelaksanaan melainkan kegiatan yang dilaksanakan. Padahal, waktu merupakan faktor penting dalam realisasi anggaran. Dengan ketepatan waktu, pelaksanaan program kerja dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik. Ketepatan waktu aparatur desa merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana aparatur desa dapat mencapai target anggaran (kuantitas, kualitas, dan waktu) dalam menjalankan tugas yang berupa tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya (Laka dan Suprasto, 2020).

Dalam perencanaan anggaran, penentuan waktu sangatlah penting. Sehingga, dalam menyusun program kerja aparatur pemerintahan dapat menyesuaikan dengan realistis tingkat pengerjaan dan ketepatan waktu proyek. Hal ini dapat membantu realisasi anggaran berjalan lebih cepat sehingga kinerja anggaran juga dapat dengan cepat terwujud. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Lestari dkk (2021) menunjukkan bahwa variabel mutu laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan dengan tepat waktu akan lebih informatif daripada laporan keuangan yang dilaporkan terlambat. Pentingnya waktu dalam setiap tahapan penganggaran bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran dan kinerja pemerintah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan anggaran yang bergerak cepat.

Melakukan Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu keharusan. Dengan melakukan kerja sama dalam merealisasikan anggaran daerah/desa dapat mengeksplor sumberdaya yang dimilikinya. Kerjasama juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas penggunaan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama yang baik dengan wilayah atau negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai identitas yang membandingkan antara satu desa dengan desa lainnya (Nasution, 2016). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mansur (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerjasama desa dapat terjalin dengan baik apabila didukung oleh layanan informasi desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Oleh karena itu, ada dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa antara lain adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Kerjasama merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat (Handayani,2015). Promosi dan kerjasama merupakan bagian terpenting yang harus diupayakan demi meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan . Promosi dan kerjasama dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, interaktif, menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang relatif murah (Suhermanto dkk, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Calyandra dan Idajati (2020) menunjukkan bahwa masyarakat desa Wonocolo melakukan pengembangan pariwisata Geotourism dengan cara menjalin kerjasama dengan investor atau swasta dalam pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga sebagai baik sebagai investor atau pemasok dapat meningkatkan kualitas desa yang kompetitif.

Faktor Dampak dari Penganggaran

Sistem anggaran berbasis kinerja menekankan pentingnya capaian output, seperti pembangunan sosial ekonomi dan aspek fisik yang dapat diukur dengan jelas. Keunggulan sistem anggaran kinerja dibandingkan sistem lainnya terletak pada sistem anggaran ini merubah paradigma penilaian kinerja lembaga berdasarkan dana yang terserap dari program atau kegiatan (Nugroho, 2008). Faktor dampak atau output sangat penting dalam menentukan kemana anggaran akan dibawa. Sehingga dalam menentukan program kerja tampak jelas output capaian dan realisasi. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (Wokas dan Gerungai, 2019).

Faktor dampak dari penganggaran berdasarkan output dapat dilihat dari kinerja anggaran. Kinerja realisasi anggaran secara tidak langsung menunjukkan persentase kemajuan atau kemunduran realisasi anggaran setiap tahunnya. Realisasi anggaran yang fluktuatif dan didominasi penurunan realisasi menunjukkan kinerja yang buruk. Sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam atas kegiatan yang sudah dianggarkan, baik kendala dan rasionalitas anggaran yang dianggarkan.

Transparansi Anggaran

Keterbukaan publik atau yang sering dikenal dengan transparansi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pihak pengguna anggaran. Hal ini tentunya sangat mudah untuk diwujudkan pada era digitalisasi. Transparansi dapat dilakukan dengan mempublikasi informasi aktifitas dan laporan pertanggungjawaban kepada publik, tentunya dengan media teknologi. Pengembangan teknologi sistem informasi berbasis web instansi sudah lumrah digunakan oleh instansi dan desa, hanya saja apakah media tersebut bisa digunakan secara aktif dan akurat. Pengembangan SISKEUDES dalam aplikasi desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif, efisien dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa (Laka dan Suprasto, 2020).

Transparansi dalam penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran akan membantu pengguna anggaran bukan hanya mengeksplorasi instansi atau desa yang dibina namun juga mempermudah pertanggungjawaban anggaran. Dalam mendukung transparansi anggaran adanya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan internal yang meliputi kegiatan yang berhubungan langsung dengan penjaminan mutu yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Latupeirissa dan Suryawan, 2021).

Dapat dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sangatlah penting, dimana seseorang menggunakan mendapatkan reward dari pekerjaan yang dilakukan, tentunya ada tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Begitu pula dengan anggaran, semakin tinggi jumlah anggaran yang dianggarkan maka akan semakin besar pula pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan kinerja aparatur desa merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dalam perkembangannya, perangkat desa masih mengalami banyak kendala dalam melaksanakan pemerintahan di desa (Laka dan Suprasto, 2020). Namun demikian kendala tersebut dapat diminimalisir dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta kemampuan penggunaan teknologi.

Dalam administrasi publik, setiap rezim pemerintahan sebagian besar akan melakukan hal yang sama, yaitu birokrasi publik dilakukan dalam rezim demokrasi. Namun, dalam demokrasi yang otoriter mereka harus melakukan secara berbeda tetapi masih harus melakukan hal-hal seperti: memberi nasehat tentang kebijakan, membuat aturan, membuat anggaran, mengkoordinasi tindakan, memberikan layanan publik, memantau kebijakan, serta mengaudit

kegiatan mereka (Peters, 2021). Sehingga bagaimanapun bentuk pemerintahan setiap organisasi harus mampu membuat pertanggungjawaban dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dkk (2019) menyatakan bahwa faktor kesempatan melakukan fraud di pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel antara lain kecamatan, total aset, penduduk dan belanja modal. Hal ini dilakukan dengan mengukur informasi keuangan dan informasi non keuangan. Hal ini sangat rentan di dalam sistem pemerintahan. oleh karenanya, pemerintah harus melakukan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih ketat dan terintegrasi sehingga menutup peluang untuk melakukan fraud.

KESIMPULAN

Menciptakan desa yang unggul, mandiri dan berkelanjutan dengan anggaran yang produktif bukan merupakan suatu kemustahilan. Dari banyak literasi yang dikumpulkan baik di dalam dan di luar negeri membangun kepercayaan publik dilakukan dengan transparansi. Hal ini tentu saja bisa mudah dilakukan di era teknologi sekarang. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu desa untuk menambah literasi, mencari informasi yang dibutuhkan, meningkatkan sumberdaya manusia serta membangun kerjasama. Anggaran desa merupakan alat bagi desa untuk meningkatkan kemakmuran desa sehingga penting untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dengan program-program pembangunan desa inovatif. Untuk meningkatkan kapasitas dan gairah desa dalam pencapaiannya, perlu dilakukan reward. Karena dengan adanya reward akan menciptakan semangat bagi desa untuk menjadi optimal dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduhalilovich , Radjabov Bunyod. (2020). Improvement of E-Governance System Management In Uzbekistan. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, ISSN (electronic): 2620-6269.
- Astika, Ida B. & Dwirandra. (2020). Information Technology Duty, Satisfaction And AIS Effectiveness Moderate Effect Of Benefits Of Informs Technology On Employee Performance. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 7(6):9-20.
- Ayuningsasi, Anak Agung Ketut. (2009). Penerapan Anggaran Belanja Dengan Pendekatan Kinerja (Performance Budget) Pada Pengelolaan Keuangan Provinsi Bali. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1): 20-26.
- Bandiyono, A. (2020). Budget Participation and Internal Control for Better Quality Financial Statements. *Jurnal Akuntansi*, XXIV(2):313-327.
- Calyandra, Ahmad Farabi & Idajati, Hertiari. (2020). Identifikasi Karakteristik Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata *Geotourism* di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teknik ITS*, X(Y):D174-D181.

- Deschamps, Elaine. (2004). The Impact of Institutional Change on Forecast Accuracy: A Case Study of Budget Forecasting in Washington State. *International Journal of Forecasting*, 20:647-657.
- Gabriel, A. G. (2017). Transparency and Accountability in Local Government: Level of Commitment of Municipal Councillors in Bongabon in The Philippines. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(3):217-223.
- Handayani, Sri dkk. (2015). Implementasi Kerjasama Desa Melalui BKAD. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1):20-25.
- Kalembang, Meise dkk. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Ketepatan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemenintah Kabupaten Jayapura). *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 2(1):35-57.
- Karbhari, Yusuf & Mohamad, Muslim Har Sani. (2007). The impact of the modified budgeting systems (MBS) on performance measurement in Malaysian central government organisations. Presented at: *Performance Measurement and Control Conference*, Nice, France, 26-28 September 2007.
- Laka, Marta D. L. M. & Suprasto, H. B. (2020). Accountability, Information Technology and Village Performance. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 7(2):71-78.
- Latupeirissa, Jonathan J.P. & Sueyawan, I. Made Y. (2021). The Role Of Inspectorate To Implementation Of The Government Internal Control System (SPIP). *International Journal of HUSOCPUMENT (Journal of Humanities, Social Science, Public Administration and Management)*, 1(1): 1-7.
- Lestari, Aning dkk. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. *Jurnal Widya Ganecwara*, 11(1):1-20.
- Maria, E. (2019). Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintahan Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1):1-16.
- Mansur. (2017). Implementasi Sistem Layanan Informasi Profil Desa Melalui Media Online Untuk Meningkatkan Tranparansi Informasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 3(1):22-27.
- Molina, Francisco S. dkk. (2017). Empowering Cash Managers to Achive Cost Saving by Improving Predictive Accuracy. *International Journal of Forecasting*, 33:403-415.
- Nasution, Robby D. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital terhadap Pembangunan Desa (Rural Development). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20(1):31-44.

- Nuhroho, Trilaksono. (2008). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Daerah (Kajian Tentang Penganggaran Daerah dengan Performance Budget System). *Jurnal Administrasi Indonesia*, 11(1):284-294.
- Peters, B. G. (2021). Studying Public Administration in Authoritarian Regimes. *Asia Pasific Journal of Public Administration*, 43(1): 1-5.
- Rahmawati, A. I. (2019). Pengaruh Kejujuran Rekan dan Penghargaan Non Moneter pada Senjangan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1):17-34.
- Rahmawati dkk . (2021). Evaluasi Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Manajemen Sebagai Pemoderasi pada Satuan Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1):191-208.
- Risna, R. & Batubara, Z. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1):95-109.
- Rohiani, Agustina. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal Regional and Rural Development Planning*, 5(1):15-27.
- Seftianova, Ratih & Adam, Helmy. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. *JRAK*, 4(1):75-84.
- Soeboko & Riyardi, Agung. (2020). Sumberdaya Manusia dalam Otonomi Daerah. *JEP*, 1(1):1-10.
- Suhermanto, Hans William dkk. (2021). Pemanfaatan Media Digital TaniHub sebagai Upaya Promosi dan Kerjasama terhadap Hasil Pertanian Desa Giripanggung. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 1(1): 74-80.
- Suryaningtyas, Dianawati. (2013). Analisis Pengaruh Kompetensi Terhadap Peran-Peran Baru Profesional Sumber Daya Manusia, *MODERNISASI*, 9(3):169-190.
- Tong, Ying & Prompanyo, M. (2021). The EffectOf Abusive Supervision on Budget Slack: The Mediating Role of Emotional Exhaustion. *Scientific Reasearch Publishing*, 10:17-29. doi.org/10.4236/ojacct.2021.102003.
- Wokas, Heince R. N. & Gerungai, Natalia Y. T. (2019). The Influence of Budgeting Based on Performance on The Effectiveness of Financial Control And The Effectiveness of Performance Control at Tomohon City Government. *Accountability*, 8(1):29-41.